

Kinerja Keuangan, Opini Audit, dan Tingkat Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia: Bukti Empiris Periode 2018-2023

Dewi Ardika¹, Afni Sirait^{2*}

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Indonesia
dewiardika13@mail.com, afni.sirait@upnyk.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: Dec 9, 2025

Accepted: Jan 04, 2026

Published: Jan 12, 2026

ABSTRACT

This study examines the relationship between financial performance, audit opinions, and corruption levels in Indonesian provincial governments during the period 2018–2023. Financial performance is proxied by efficiency, effectiveness, fiscal independence, and fiscal dependency ratios, while audit opinions are measured based on opinions issued by the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Corruption is measured using the number of corruption cases reported by Indonesia Corruption Watch (ICW). Using panel data from ten provinces with the highest corruption cases and applying multiple linear regression analysis, the results show that fiscal dependency has a significant effect on corruption levels, whereas efficiency, effectiveness, fiscal independence, and audit opinions do not exhibit significant individual effects. Nevertheless, the variables jointly explain variations in corruption levels, indicating that corruption in local governments is better understood as a systemic governance issue rather than the outcome of isolated financial performance indicators or audit results.

.Keywords: *Audit opinion; Corruption level; Financial performance; Financial ratio; Indonesia governance*

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi permasalahan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 berada pada angka 34 dari 100, yang menunjukkan masih tingginya persepsi korupsi di sektor publik. Sepanjang tahun 2023, tercatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka dan estimasi kerugian negara mencapai Rp28,41 triliun. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sektor pemerintahan masih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Suyatmiko, 2021 berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, seperti penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembentukan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta penerapan kebijakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam perspektif teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mengelola sumber daya publik atas nama masyarakat sebagai prinsipal. Ketidakseimbangan informasi dan lemahnya mekanisme pengawasan dapat membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik, termasuk korupsi. Oleh karena itu kinerja keuangan daerah dan opini audit dipandang sebagai indikator penting dalam menilai akuntabilitas fiskal dan efektivitas pengelolaan keuangan publik (Shidqi & Arfiansyah, 2025). Korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan efisiensi pengelolaan anggaran dan meningkatkan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat (Li et al., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara kinerja keuangan daerah, opini audit, dan tingkat korupsi namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Triya Setia Ningsih (2022) menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, sedangkan Zulhaerini et al., (2025) menyatakan adanya pengaruh signifikan. Sementara itu Azizi